

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan riau ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja OPD Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Tahun 2017-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau yang dihasilkan di tahun 2019, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran : Peningkatan Kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan)Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, dengan indikatornya Persentase bangunan yang berciri khas melayu, capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah 14,32%, Persentase nilai budaya adat tradisi yang digali direvitalisasi diaktualisasi capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah 40,64 %,Persentase Warisan Tangible yang lestari capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah 22,03 %,Persentase Organisasi Budaya yang berkategori Maju capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah 94,02 %, Persentase

Sanggar seni yang aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah 66,02 %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau ke depan. Pertama, Perubahan fungsi ruang yang mengancam keberadaan Cagar Budaya. Kedua, Harapan terhadap pengembangan dan pemanfaatan Potensi Budaya yang mampu memberi manfaat secara sosial dan ekonomi.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pedoman bagi OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat daerah Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2019, serta Penetapan Kinerja Tahun 2019 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dapat terlaksana dengan baik ketika Perencanaan yang dilakukan menghasilkan program dan kegiatan yang mampu menjawab permasalahan, mengembangkan potensi budaya, dan meraih visi. Pada tataran pelaksanaan pun dukungan dana, prasarana sarana, dan SDM Kebudayaan sangatlah berpengaruh dan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau selalu berupaya untuk selalu taat proses, tertib administasi, dan berorientasi hasil.

Pada akhir tahun anggaran pelaksanan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan di evaluasi dan di ukur tingkat keberhasilannya yang disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di singkat sebagai LKj IP. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Tanjungpinang,

Pebruari 2020

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Ir. YERRI SUPARNA, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19620418 199303 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	į
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	٧
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Struktur Organisasi	2
1.2. Fungsi dan Tugas	3
1.3. Kepegawaian	4
1.4. Sarana dan Prasarana Pendukung	6
1.5. Keuangan	8
1.6. Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan	
Riau	8
1.7. Sistematika Pembahasan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Perjanjian Kinerja	10
2.2. Tujuan	10
2.3. Sasaran	11
2.4. Rencana Kinerja	12
2.4.1.Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	13
2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2019	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Pengukuran Kinerja	17
3.1.1. Penetapan Indikator Kineria	17



		3.1.2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja	18
		3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja	18
	3.2.	Capaian Kinerja tahun 2019	19
	3.3.	Evaluasi dan Analisis Kinerja	21
	3.4.	Akuntabilitas Keuangan	54
BAB I	V. P l	ENUTUP	64
Lampii	ran		





DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 1.	2 Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri
	Berdasarkan Tingkat Pendidikan 5
Tabel 1.	3 Perincian Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan Prov. Kepri
	Tahun 2019 6
Tabel 1.	4 Anggaran dan Realisasi keuangan Tahun 2019 8
Tabel 2.	1 Indikator Kinerja Periode Renstra 2017-2021 12
Tabel 2.	2 Matrik Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.	Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan tahun Anggaran 2019 15
Tabel 3.	1 Skala Pengukuran capaian sasaran Kinerja Tahun 2019 19
Tabel 3.	2 Capaian Kinerja Tahun 2019 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan
	Riau Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2019. 20
Tabel 3.	3 Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
	dengan jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Tahun
	2017-2021
Tabel 3.4	4 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Bangunan Berciri
	khas Melayu Tahun 2018-2019
Tabel 3.	5 Tabel data Bangunan Yang berciri khas melayu di 7 kabupaten/Kota 27
Tabel 3	6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Nilai Budaya adat
	tradisi yang digali direvitalisasi diaktualisasi Tahun 2018-
	2019
Tabel 3.	7 Tabel data Nilai Budaya adat tradisi yang di gali direvitalisasi diaktualisasi
	yang di catat oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan 35
Tabel 3.	8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Warisan Tangible yang Lestari
	Tahun 2018-2019 40
Tabel 3.9	9 Tabel data Warisan Tangible Yang Lestari di 7 kabupaten/Kota
Tabel 3.	10Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Organisasi Budaya
	vang Berkategori Maiu Tahun 2018-201949



Tabel 3.11	Tabel data Organisasi yang ada di 7 kabupaten/Kota 51
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sanggar Seni yang
	Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal 54
Tabel 3.13	Tabel data Sanggar Seni yang ada di 7 Kabupaten/kota 57
Tabel 3.14	Realisasi Penyerapan Dana Per 31 Desember 2019 61
Tabel 3.15	Anggaran dan Realisasi belanja langsung per Indikator Tahun 2019
	2019 62





Bab I Berisi:

- 1. Struktur organisasi
- 2. Fungsi dan tugas
- 3. Keadaan Pegawai
- 4. Sarana dan Prasarana
- 5. Keuangan
- 6. Isu Strategi
- 7. Sistematika LKP

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan

bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

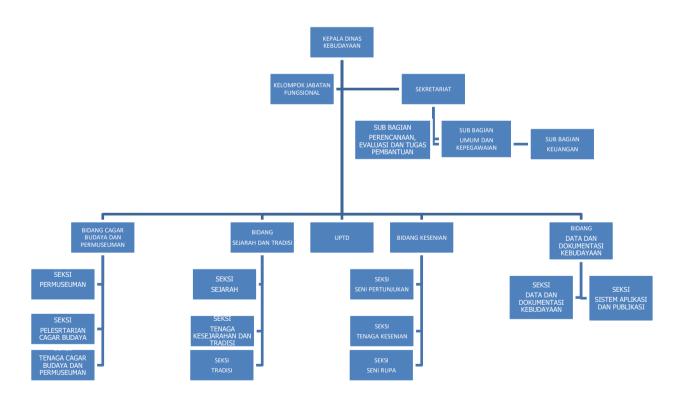
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau Tahun 2019 diharapkan dapat:

- 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau
- 2. Mendorong OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
- 3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerjanya.
- 4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Struktur Organisasi

OPD Dinas Kebudayaan Kebudayaan Provinsi kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah Provinsi kepulauan Riau yang ditandatangani pada 11 juli 2011, pada Bab XVI, Bagian kesatu disebutkan KedudukanTugas fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

OPD Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



1.2. Fungsi dan Tugas

Dinas Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan sesuai dengan lingkup tugasnya.Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, pengadaan, pembangunan dan perawatan sarana prasarana kebudayaan dan pembinaan tenaga kebudayaan;
- b. pembinaan dan pengelolaan cagar budaya, pelestarian tradisi, pengadaan, pembangunan dan perawatan sarana prasarana kebudayaan dan pembinaan tenaga kebudayaan;
- c. pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten / kota dalam satu provinsi;
- d. pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten / kota dalam satu provinsi;
- e. pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten / kota dalam satu provinsi;
- f. pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten / kota dalam satu provinsi;
- g. pembinaan sejarah lokal provinsi;
- h. penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi;
- i. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar provinsi;
- j. pengelolaan museum provinsi;
- k. pelaksanaan dan fasilitasi kerja sama di bidang kebudayaan;
- I. perumusan rancangan regulasi kebudayaan di daerah;

- m. fasilitasi pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan;
- n. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, pengadaan, pembangunan dan perawatan sarana prasarana kebudayaan, dan pembinaan tenaga kebudayaan;
- penyelenggaraan pelaporan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, pengadaan, pembangunan dan perawatan sarana prasarana kebudayaan dan pembinaan tenaga kebudayaan;
- p. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- q. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

1.3. Kepegawaian

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas berdasarkan struktur organisasi didukung sebanyak 17 jabatan struktural dan staf. Potensi sumber daya asn Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau (tahun 2018) sebanyak: 31 orang pegawai, terdiri dari laki-laki sebanyak 16 orang, dan perempuan sebanyak 15 orang. Untuk saat ini jumlah pegawai tersebut tergolong cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan terkait urusan kebudayaan. Namun demikian untuk periode lima tahun ke depan sejalan dengan perkembangan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau jumlah tersebut masih kurang mencukupi. Apabila setiap pejabat struktural mempunyai tiga orang staf, maka masih dibutuhkan sebanyak 51 orang staf. Mengingat Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau berada pada level provinsi yang harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota, maka sesungguhnya jumlah staff

untuk setiap jabatan struktural harus memadai, hal ini terkait erat dengan bidang tugas yang harus ditangani oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sangat luas. Adapun perincian jumlah aparatur sipil negara sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri
berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jml	Jenis K	Celamin
140		Pegawai	L	P
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	31	16	15
2	Non- PNS	35	21	14
	Jumlah	66	37	29

Sumber data: Disbud Provinsi Kepri, 2019.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel 1.2
Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Status	Jml		PENDIDIKAN					
NO	Kepegawaian	Pegawai	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	Pegawai Negeri	31	1	4	22	2	2		
2	Tenaga Kontrak / PTT	35			7	5	20		3
	Total	66	1	4	29	7	22	0	3

Sumber data: Disbud Provinsi Kepri, 2019.

Berdasarkan analisis tingkat pendidikan ASN Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebenarnya sudah cukup memadai. Namun apabila tugas semakin meluas, maka diperlukan banyak pegawai yang mempunyai keahlian manajerial baik lulusan Sarjana (S-1) atau Magister (S-2). Mengingat kajian dan kerja bidang kebudayaan sangat luas dan selalu berkembang, maka untuk memperoleh hasil yag lebih baik, maka dibutuhkan pegawai yang mempunyai keahlian lebih di bidangnya masing-masing. Paling tidak, pada semua pejabat struktural,

pendidikan lanjut (Magister/S2) dan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugas-tugasnya.

Selanjutnya dalam hal tugas-tugas yang menyangkut analisis kebudayaan dan pendapat-pendapat yang harus diberikan oleh Dinas Kebudayaan oleh pihak lain, sekaligus untuk mengembangkan kebudayaan yang ada, dibutuhkan pegawai ahli dengan tambahan pelatihan dan diklat.

Perlunya aparatur sipil negara (ASN) meneruskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi bagi pegawai Dinas Kebudayaan, harus memperhatikan tupoksi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, jenis atau jurusan studi yang direkomendasikan adalah kebudayaan, sejarah, cinematografi, kemaritiman (khususnya budaya maritim). Dengan demikian secara kualitas maupun kuantitas pegawai akan sangat mendukung tupoksi yang diemban oleh seluruh pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

1.4. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Perincian Sarana dan Prasarana
Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Tahun 2019

No	Nama barang	Satuan	Jumlah
Α	Gedung Perkantoran		
1.	Gedung Dinas Kebudayaan	unit	1
2.	Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM)	unit	1
۷.	dan Gedung Kesenian	unic	1
В	Kendaraan Bermotor		
3.	Mobil	unit	4
4.	Sepeda Motor	unit	5
С	Prasarana dan Sarana Kantor		
5.	Meja Kerja	unit	82
6.	Kursi	unit	182
7.	Lemari dan Brankas	unit	2
8.	Lemari dan Filling Cabinet	unit	94
9.	Lemari lainnya	unit	10
10.	Air Conditioner dan AC Split	unit	37

No	Nama barang	Satuan	Jumlah
11.	Air Cooler	unit	3
12.	LCD dan layar	unit	4/6
13.	Televisi	unit	6
14.	Camera	unit	7
15.	Handycam	unit	4
16.	Kulkas	unit	5
17.	Sound System	set	1
D	Peralatan Kantor		
18.	Komputer PC	unit	52
19.	Laptop	unit	43
20.	Printer	unit	83
21.	UPS/power suplly	unit	37
Е	Alat Musik		
23	Kelengkapan alat musik	set	1
24	Alat Musik Melayu	set	1
F	Benda Budaya	set	1
G	Pakaian Tari	stel	750

Sumber data: Disbud Provinsi Kepri, 2019

Berdasarkan sarana prasarana Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau, maka sebenarnya masih membutuhkan gedung atau ruang yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, yaitu adanya gedung arsip, dan ruang pamer. Gedung ini sangat dibutuhkan karena dalam pengembangan budaya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, maka gedung arsip yang menyimpan arsip budaya Melayu sangat diperlukan. Gedung Arsip dan Ruang Pamer bersama dengan Perpustakaan merupakan "jantungnya" Dinas Kebudayaan, apabila kantor ini ingin maju dengan berbagai hasil yang bermanfaat dalam pengembangan budaya Melayu. Perpustakaan harus menyimpan hasil kerja dari berbagai bidang di Dinas Kebudayaan. Hasil kajian budaya, rekaman kegiatan dan aktivitas budaya, arsip-arsip budaya, dan sumber-sumber tentang budaya khususnya Budaya Melayu, perlu dikoleksi di gedung atau ruang khusus dari Dinas Kebudayaan. Dengan demikian, visi Provinsi Kepulauan Riau yaitu "Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di bidang Maritim", benar-benar

dapat diwujudkan. Kebutuhan ini tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan budaya bagi provinsi Kepulauan Riau saja, tetapi harus menjadi sumber informasi tentang budaya melayu bagi semua orang yang membutuhkan keterangan dan penjelasan ataupun melakukan penelitian tentang budaya melayu.

1.5. Keuangan

Untuk melaksanakan program/kegiatan selama Tahun 2019, Anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau untuk anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 12.587.452.874 anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 11.679.472.526 (92,79%). Anggaran dan realisasi keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1.4
Anggaran dan Realisasi keuangan Tahun 2019

No.	Sumber Dana BL	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Silpa (Rp)	%
1.	APBD	12.587.452.874	11.679.472.526	907.980.348	92,79

1.6. Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Adapun Isu Strategis yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

- 1. Belum optimalnya pelestarian kekayaan budaya, karya bahasa/sastra melayu, dan pengelolaan benda, situs dan cagar budaya.
- 2. Belum terciptanya *brand image* dan ikon Kepri sebagai pusat kebudayaan melayu, dan kurangnya promosi budaya melayu.

- 3. Kurangnya penyelenggaraan event seni budaya melayu berskala regional, nasional dan internasional.
- 4. Arus globalisasi menyebabkan masyarakat ter-*infiltrasi* dengan budaya asing sehingga nilai-nilai agama dan budaya cenderung ditinggalkan.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019. Strategis disini maksudnya adalah dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, sementara dari sisi pembiayaan disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Pembobotan dibuat masih sangat terbatas hanya dengan memperhatikan kontribusi kegiatan dalam menyerap anggaran. Berdasarkan realisasi kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian indikator dan indikator sasaran. Capaian kinerja perkegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output dan outcome.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan,

Memaparkan Profil Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memaparkan Perencanaan Startegis Perjanjian Kinerja dan Rencana Anggaran

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Memaparkan capaian Kinerja Tahun 2019 Evaluasi dan Akuntabilitas Anggaran

Bab IV Penutup

Memaparkan hasil ringkas laporan kinerja permasalahan dan rencana aksi Lampiran-lampiran yang mendukung penyusunan LAKIP.



Bab II Berisi:

- 1. Perjanjian Kinerja
- 2. Tujuan
- 3. Sasaran
- 4. Rencana Kinerja
- 5. Penetapan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator Kinerja.Melalui perjanjian ,terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas,fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

2.2 Tujuan

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi, misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau di hasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, maka tujuan ingin dicapai adalah :

- 1. Mewujudkan Visi *Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu*yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang

 Maritim"
- 2. Terwujudnya pembangunan kebudayaan di Kepualuan riau yang terintegrasi dan berkelanjutan

3. Terciptanya hubungan kemitraan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan pemangku adat, penggiat seni dan budaya baik yang ada di wilayah adminsitratif Kepulauan Riau maupun di luar wilayah Kepulauan Riau.

2.3. Sasaran

Sasaran menggambarkan sesuatu yang ingin dihasilkan atau dicapai Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Sasaran merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta untuk lebih menjamin pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, holistic dan komprehensif. Proses Pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program, dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat di ukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan/proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien.

Pencapaian tujuan sasaran dan indikator sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang ditetapkan, Dinas Kebudayaan juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk periode Renstra telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Periode Renstra 2017-2021

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satu an	Target awal 2019	Target Akhir 2021
Peningkatan kinerja dalam Pelestarian	Persentase Bangunan yang berciri khas melayu	%	32,33	70,75
(Pelindungan,Peng embangan,Pemanf aatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau	Persentase Nilai budaya,adat tradisi yang digali ,direvitalisasi,diaktu alisai	%	32,78	71,91
	Persentase warisan Tangible yang lestari	%	20,98	22,38
	Persentase Organisasi Budaya yang berkategori maju	%	43,48	72,46
	Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan Tradisi Lokal	%	35,62	72,03

2.4 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut yang mencakup periode dari rencana strategis yang telah disusun. Dalam proses rencana kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dimplementasikan dalam satu tahun kegiatan. Rencana kinerja satu tahun anggaran disebut juga dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang menjabarkan dan menetapkan angka target kinerja tahunan untuk seluruh indikator knerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target

kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Kebudayaan untuk mencapai sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan

2.4.1. Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Sasaran Strategis

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau mengidentifikasikan sasaran-sasaran yang ingin dicapai di Tahun 2019 Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasikan indikator kinerja Utama (IKU) yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerja ini diambil langsung dari dokumen rencana strategis yang telah ada.

2. Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir perencanaan strategis, diidentifiasikan program-program yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2019 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan

3. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan. Pada tahap ini didefinisikan indikator kinerja untuk setiap kegiatan.

4. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan, Adapun rencana kinerja tahun anggaran 2019 dijabarkan dalam matrik Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut

Tabel 2.2

Matrik Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2019

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan,Pengemb	Persentase Bangunan yang berciri khas melayu	%	32,33
angan,Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau	Persentase Nilai budaya,adat tradisi yang digali ,direvitalisasi,diakt ualisai	%	32,78
	Persentase warisan Tangible yang lestari	%	20,98
	Persentase Organisasi Budaya yang berkategori maju	%	43,48
	Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan Tradisi Lokal	%	35,62

2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2019

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, Tujuan Khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas transparasi dan kinerja aparatur sebagai wujud komitme n antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi. Dalam penyusunan dokumen penetapan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 memperhatikan:

- a. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (Renstra 2017-2021)
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT 2019)
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA 2019)

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan tahun Anggaran 2019

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan,Pengembangan ,Pemanfaatan) kebudayaan	Persentase Bangunan yang berciri khas melayu	32,33
Provinsi kepulauan Riau	Persentase Nilai budaya,adat tradisi yang digali ,direvitalisasi,diak tualisai	32,78

Persentase warisan Tangible yang lestari	20,98
Persentase Organisasi Budaya yang berkategori maju	43,48
Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan Tradisi Lokal	35,62



Bab III Berisi:

- 1. Pengukuran Kineria
- 2. Capaian Kinerja Tahun 2019
- 3. Evaluasi dan Analisis Kinerja
- 4. Akuntabilitas Keuangan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Setiap target kinerja yang ditetapkan perlu diketahui tingkat pencapaiannya pada akhir tahun anggaran. Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019, Dinas Kebudayaan berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap

target kinerja yang ditetapkan serta bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggujawabkan.berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran strategis beserta indikator kinerjanya serta realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kineria tersebut.

3.1 Pengukuran Kinerja

3.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi atas indikator-indikator yang disepakati melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Penetapan ja indikator kinerja didasarkanapkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada.

Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, yaitu dimulai dari penetapan tujuan dan sasaran. Dalam menetapkan indikator sasaran, digunakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut, yaitu berupa indikator kinerja *output* dan *outcome*.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja yaitu indikator input, indikator output, indikator outcome, indikator benefit dan indikator impact. Tiap-tiap indikator kinerja

ditetapkan satuannya berupa dana, satuan rupiah, sumber daya manusia, jumlah ketentuan, aturan serta satuan lainnya yang sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Kelompok indikator kinerja yang digunakan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau baru meliputi indikator kinerja input, output dan outcome. Sedangkan indikator kinerja benefit dan impact belum dapat disajikan karena umumnya indikator ini baru dapat diukur dalam 2 atau 3 tahun kemudian yang tentunya juga sangat dipengaruhi oleh kinerja diluar Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

3.1.2 Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja Dinas Kebudayaan dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomisan dan efektivitas.

Penetapan data kinerja untuk indikator kinerja input, output dan outcome dilakukan setiap awal tahun sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Pada saat kegiatan berjalan dilakukan evaluasi dan monitoring kegiatan untuk mengetahui kendala dan hambatan serta solusi penting yang akan diambil agar sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan pengumpulan dan analisis data kinerja untuk mengukur ketercapaian indikator kinerja dimaksud. Dengan demikian perencanaan yang diharapkan dapat berjalan dengan lebih baik dan evaluasi atas pengukuran kinerja dapat lebih bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan.

3.1.3 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah Kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar,rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja, sistem pengumpulan kinerja dan penetapan capaian kinerja. Setelah itu, dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan sebagai dasar untuk menilai keberhasilaan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3.1
Skala Pengukuran capaian sasaran Kinerja Tahun 2019

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Skor	
1	Lebih dari 100%	Sangat baik	Sangat baik	
2	75% sampai 100%	Baik	Baik	
3	55% sampai 75%	Cukup	Cukup	
4	Kurang dari 55%	Kurang	Kurang	

[❖] Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2. Capaian Kinerja tahun 2019

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2019 ,Dinas Kebudayaan menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 5 Indikator Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019 berikut tingkat ketercapaian 3 (tiga) selama tahun 2019

1. Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau,

Ketercapaian sasaran strategis Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau, melalui 5 (lima) Indikator kinerja, yaitu

- a. Persentase Bangunan yang berciri khas melayu
- b. Persentase nilai budaya Adat tradisi yang digali direvitalisasi diaktualisasi
- c. Persentase warisan Tangible yang Lestari
- d. Persentase Organisasi Budaya yang berkategori maju

e. Persentase Sanggar Seni yang aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal.

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2019

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019			
		Target	Realisasi	%	Kriteria
Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan,Pengemba ngan,Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau	Persentase bangunan yang berciri Khas Melayu	32,33	14,32	44,28	kurang
	Persentase nilai budaya Adat tradisi yang digali,direvitalisasi,Dia ktualisas	32,78	40,64	123,98	Sangat Baik
	Persentase Warisan Tangible yang Lestari	20,98	22,03	105.01	Sangat Baik
	Persentase Organisasi Budaya Yang berkategori maju	43,48	94,20	216,66	Sangat baik
	Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan	35,62	66,02	185,35	Sangat baik

Kesenian dan Tradisi		
Lokal		

Berdasarkan Tabel diatas ada 3 (tiga) indikator untuk mendukung sasaran 1 yaitu Persentase bangunan yang berciri khas Melayu dengan target penetapan kinerja tahun 2019 sebesar 32,33 % realisasi 14,32 % capaian 44,26 % dan dapat dikategorikan capaian kinerja ini *kurang*, indikator Persentase Warisan Tangible yang Lestari dengan target pada tahun 2019 sebesar 20,28 % realisasi 22,03 % capaian 105,01%, capaian ini dapat di kategorikan *sangat Baik*. indikator Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal dengan target pada tahun 2019 sebesar 35,62% realisasi 66,02 % capaian sebesar 185,35 %,capaian ini dapat dikategorikan "sangat baik", indikator Persentase Organisasi Budaya Yang berkategori maju target tahun 2019 sebesar 43,48 % realisasi 94,20% capaian 216,66 % capaian ini dapat dikategorikan *Sangat Baik*, dan Persentase Nilai budaya,Adat Tradisi yang digali direvitalisasi,diaktualisasi sebesar 32,78% realisasi 40,64 % capaian 123,98 % ini dikategorikan capaian kinerja pada indikator ini *sangat Baik*, dari 5 Indikator ini ada 4 Indikator yang melebihi target yang telah ditetapkan.

1.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Adapun evaluasi yang terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian pada masing-masing sasaran dapat kami kemukakan sebagai berikut :

Sasaran I

Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau dengan mayoritas penduduk Suku Melayu. Kepulauan Riau menjadi Pusat Kebudayaan Melayu dengan beberapa potensi situs peninggalan sejarah, perpustakaan melayu, kesenian maupun adat istiadat orang melayu yang unik dan mengagumkan. Keunikan budaya melayu dan adat istiadat yang masih kental menjadikan daya tarik dan jatidiri masyarakat Melayu yang perlu dipertahankan dan dilestarikan.Pengelolaan Kebudayaan yang menjadi kewenangan provinsi mencakup pengelolaan kebudayaan daerah, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman. Budaya yang bersifat fisik berupa cagar budaya, situs dan peninggalan budaya. Budaya tak benda (intangible) berupa tradisi, ekpresi lisan termasuk bahasa, seni pertunjukkan, adat istiadat masyarakat, ritual dan perayaaan-perayaan, pengetahuan dan perilaku mengenai alam semesta, dan keterampilan dan kerajinan tradisional sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Unesco Tahun 2003 tentang Warisan Budaya Tak Benda yang telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007.

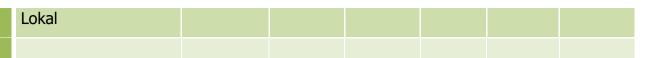
Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang kebudayaan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan. Dinas Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan perlu diwujudkan melalui perencanaan lima tahunan di bidang kebudayaan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan tahun 2017-2021.

Pencapaian sasaran Meliputi 5 (lima) Indikator dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah yang terdapat dalam Perubahan Renstra Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian		2019		Target	Capaia
		Tahun 2018	Target	Realisa si	%	akhir renstra 2021	n s/d 2019 terhad ap 2021 (%)
1	Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu	11,68	32,33	14,32	44,28	70,75	20,24
2	Persentase Nilai Budaya,Adat Tradisi yang digali,Direvitalisasi,Di aktualisasi	19,98	32,78	40,64	123,98	71,91	56,51
3	Persentase Warisan Tangible yang Lestari	19,93	20,98	22,03	105,01	22,38	98,43
4	Persentase Organisasi Budaya yang Berkategori Maju	37,68	43,48	94,20	216,65	72,46	130,00
5	Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi	13,29	35,62	66,02	180,40	72,03	91,65



a. Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu

Bangunan yang berciri khas melayu adalah Bangunan yang mempunyai spesifik atap ataupun ornamen melayu.

Persentase Bangunan yang berciri khas melayu merupakan perbandingan dari bangunan yang berciri khas Melayu dengan Bangunan yang ada di 7 kabupaten/kota

Evaluasi terhadap Persentase Bangunan yang berciri khas melayu sampai dengan Tahun 2019 dapat digambarkan Bangunan yang sudah berciri khas melayu yakni 272 bangunan dibagi dengan bangunan yang ada di 7 Kabupaten/Kota 1900 terdiri dari Bangunan Pemerintah dan Swasta.

Hasil evaluasi Persentase Bangunan yang berciri khas melayu dengan target sebesar 32,33 % dapat tercapai sebesar 14,32 % sehingga capaian kinerja sebesar 44,29 dalam kategori kinerja " *kurang* ".

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2019 ,Dinas Kebudayaan menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 1 Indikator Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019 berikut tingkat ketercapaian selama tahun 2019.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu dari Tahun 2017-2019:

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %
1	Persentase Bangunan yang berciri khas melayu	32,33	14,32	44,29

Sumber data : Bidang Kesenian

dari tabel 3.2 menunjukkan adanya peningkatan disetiap tahunnya, pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya capaian indikator Persentase bangunan yang berciri khas Melayu pada tahun 2019 mencapai 14,32 % bila dibandingkan pencapaian Tahun 2018 yang hanya mencapai 11,68 % maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 telah terjadi kenaikan sebesar 81,56 %

Berdasarkan Tabel diatas Persentase bangunan yang berciri khas Melayu dengan target penetapan kinerja tahun 2019 sebesar 32,33 realisasi hanya 14,32 % dari target yang telah di tentukan capaian 44,29 %, dan dapat dikategorikan capaian kinerja ini "*kurang*"



dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dalam mencapai target indicator Persentase Bangunan Berciri Khas Melayu, tetapi dinas kebudayaan telah berusaha semaksimal mungkin melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota baik itu pemerintah dan swasta dalam mencapai target

Pada tahun 2019 masih banyak kendala yang

Kantor Lam Kabupaten Bintan

Tentang Bangunan berciri khas melayu kepulauan riau yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2018. Pada tahun 2019 di APBD-P Dinas Kebudayaan telah melakukan Sosialisasi Perda bangunan berciri khas melayu ini adalah bentuk komitmen Pemerintah untuk dapat menggesa agar Perda ini dapat dilaksanakan dengan cepat baik di lingkungan pemerintah dan Swasta sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah yaitu memperkuat Indetitas masyarakat Kepulauan Riau dengan membuat suatu icon dalam bentuk bangunan berciri khas melayu yang merupakan salah satu kekayaan budaya masyarakat melayu di kepulauan Riau yang telah diwariskan secara turun menurun dari generasi ke generasi ,sehingga dapat memberikan dampak positif dalam penanaman nilai-nilai khazanah budaya local kepada masyarakat selain itu juga Dinas kebudayaan melakukan Inventarisasi dan Monitoring ke 7 Kabupaten/kota menyangkut bangunan berciri khas melayu ini. Hasil dari inventarisasi dan Monitoring ke kabupaten/kota Pada Tahun 2019 sudah ada Bangunan pemerintah dan Swasta yang berciri khas melayu sebanyak 50 Bangunan Pemerintah dan swasta.



Grafik Realisasi Capaian Kinerja

Dapat digambarkan pada Grafik ini pada setiap tahun nya terjadi peningkatan pada realisasi capaian sebesar 81,56 %. Pada tahun 2019 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 32,33 % atau 614 bangunan dikarenakan adanya kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target maka sampai dengan tahun 2019 realisasi hanya sebesar 14,32 % atau 272 bangunan yang sudah berciri khas melayu sehingga realisasi

capaian sampai dengan tahun 2019 sebesar 44,29 % dapat dikategorikan capaian kinerja ''kurang''.

Adapun Persentase bangunan yang berciri khas melayu pada setiap Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :**Tabel 3.5**

Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu se Provinsi Kepri

		Tahun	2016	Ta	ahun 2017		Tahun 2018			Tahun 2019	
No	Kab/ Kota	Bangunan yang berciri khas melayu	Bangunan keseluruhan bangunan milik pemerintah dan Swasta	Bangunan yang berciri khas melayu	Bangunan keseluruhan bangunan milik pemerintah dan Swasta	Bangunan yang berciri khas melayu	Bangunan keseluruhan bangunan milik pemerintah dan Swasta	Bangunan Yang Berciri Khas Melayu sampai 2018	Bangunan yang berciri khas melayu	Bangunan keseluruhan bangunan milik pemerintah dan Swasta	Bangunan Yang Berciri Khas Melayu sampai 2019
1	TanjungPinang	n/a	76	20	965	27	965	47	3	965	50
2	Bintan	3	215	3	285	25	285	28	3	285	31
3	Batam	7	106	7	214	8	214	15	8	214	39
4	Karimun	6	88	6	143	9	143	15	11	143	32
5	Lingga	10	121	12	148	3	148	15	18	148	43
6	Natuna	n/a	n/a	2	62	14	62	16	6	62	22
7	Anambas	n/a	n/a	5	60	30	60	35	1	60	32
8	Provinsi Kepulauan Riau	6	n/a	6	23	17	23	23	0	23	23
	Total	32	606	57	1900	133	1.900	222	50	1.900	272

Kendala yang di hadapi

- Masih belum optimal nya Sosialisasi Perda ini dilakukan sehingga masih banyak khusus nya di pihak swasta yang belum memahami isi dari perda tersebut.
- Faktor Geografis kepulauan Riau yang merupakan Pulau-pulau menjadi salah satu faktor kendala dalam mensurvey bangunanyang bercirikhas melayu yang ada di kabupaten/kota yang berpisah dengan daratan dari provinsi kepulauan Riau sebagai Penunjang database

Solusi

- Pada tahun 2019 dinas kebudayaan telah disahkannya Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2019 Tentang Bangunan Berciri khas Melayu sehingga akan berdampak dalam mencapai target ke depannya dan tahun 2020 Dinas kebudayaan akan menggesa Pergub Bangunan Berciri khas melayu
- Dinas Kebudayaan melakukan kerjasama dengan stakeholders yang berkompeten dibidang arsitektur sehingga ke depan nanti nya ada keseragaman bentuk bangunan khusus bangunan milik pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau termasuk 7 kabupaten/kota
- Dinas kebudayaan akan terus melakukan Inventarisasi agar data lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dan akan dijadikan sebagai database Dinas Kebudayaan sehingga dapat dipublikasikan ke masyarakat.
- Untuk mencapai target langkah yang akan dilakukan oleh Dinas kebudayaan tahun 2021 ,dinas kebudayaan Provinsi kepulauan Riau akan membuat kegiatan Pengadaan ornamen melayu,dan akan lebih optimal dalm mensosialisasi kan perda bangunan berciri khas melayu dengan kegiatan ini Dinas Kebudayaan optimis akan mencapai target pada akhir RPJMD nanti.

program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

N	Progra	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Output	Keterkaitan output	
0	m		(Perubaha	Rp	kegiatan	terhadap pencapaiai	
			n)			sas	saran
			Rp.			Menunja	Kurang
						ng	menunjan
						Pencapa	g
						ian	pencapaia
							n
1	Program	Sosialisasi Perda	200.000.000	195.597.649	Jumlah	✓	
	Pengemb	bangunan			orang yang		
	angan	berciri khas			mengikuti		
	Nilai	melayu			Sosialisasi		
	budaya	Pembuatan	200.000.000	199.545.900	Jumlah	✓	
		buku Arsitektur			buku yang		
		Melayu			dihasilkan		
		Kepulauan Riau					
		Pembuatan	150.000.000	138.637.600	Perda yang	√	
		Perda bangunan			dihasilka n		
		berciri khas					
		melayu lanjutan					

b. Persentase Nilai Budaya Adat Tradisi yang di Gali, Direvitalisasi, Diaktualisasi

Revitalisasi budaya bertujuan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting dari budaya dengan penyesuaian baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian nilai budaya. Pelestarian budaya adalah dalam rangka meningkatkan ketahanan budaya melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Dalam revitalisasi sebagai upaya untuk menggali kembali budaya yang berkembang pada masa dahulu, namun akibat suatu perubahan budaya yang disebabkan pengaruh arus globalisasi, budaya yang lama itu mengalami degradasi atau bahkan hampir punah atau sudah punah sama sekali. Agar budaya atau karya budaya masa lalu tidak punah atau hilang begitu saja maka melalui Program Pengembangan Nilai Budaya Bidang Sejarah dan Tradisi pada tahun 2019 membuat suatu kegiatan yaitu: Pencatatan Karya Budaya Kepulauan Riau dan Pengusulan Karya Budaya Kepulauan Riau menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia, Kajian bedah Gurindam XII,Pelatihan Tudung Manto,Pelatihan gazal Tk.SMA ,pelatihan pembuatan tanjak.

Persentase nilai budaya, adat tradisi yang digali, direvitalisasi. diaktualisasi, merupakan perbandingan realisasi jumlah karya budaya yang ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia dengan jumlah karya budaya yang sudah tercatat. Warisan Budaya Tak benda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan – serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya- bahwa masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Warisan Budaya Tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi, yang secara terus menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan memberikan rasa identitas yang berkelanjutan, untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Untuk tujuan Konvensi ini, pertimbangan akan diberikan hanya kepada Warisan Budaya Takbenda yang kompatibel dengan instrumen hak asasi manusia internasional yang ada, serta dengan persyaratan saling menghormati antar berbagai komunitas, kelompok dan individu, dalam upaya pembangunan berkelanjutan).

Jumlah karya budaya Provinsi kepulauan Riau yang sudah tercatat di data base Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Warisan Diplomasi Budaya adalah 92 karya budaya sedangkan karya budaya yang dapat ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dari tahun 2013 sampai 2018 ada 20 buah karya budaya. Pada

tahun 2019 karya budaya yang ditetapkan menjadi warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia menjadi 36 buah karya budaya, yang artinya ada penambahan 16 (enam belas) karya budaya yang ditetapkan oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI sebagai WBTB Indonesia,sedangkan target yang di tetapkan adalah 15 Karya Budaya dan didukung 3 kegiatan yang mendukung indicator ini.



Grafik Realisasi Capaian Kinerja

Grafik ini menggambarkan pada tahun 2018 realisasi sebesar 19,98 % atau 9 karya budaya, pada tahun 2019 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 32,78 % atau 15 karya budaya realisasi pada tahun 2019 telah melebihi target sebesar 40,64 % atau 19 karya budaya sehingga realisasi capaian sampai dengan tahun 2019 sebesar 123,98 % dapat dikategorikan capaian kinerja "Sangat baik", jika di Akumulasi jumlah karya budaya dari tahun sebelumnya capaian kinerja dari indicator ini adalah 60,62 % atau 43 Karya budaya.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu dari Tahun 2018-2019 :

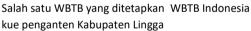
Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Nilai Budaya, Adat Tradisi yang di Gali,
Direvitalisasi, Diaktualisasi

No	Indikator Kinerja	Realisas 2018	Realisasi 2019
1	Persentase Nilai Budaya,Adat Tradisi yang digali,Direvitalisasi,Diaktualisasi	19,98	40,64

Sumber data: Bidang Sejarah dan Adat tradisi

Berdasarkan Tabel diatas Persentase Nilai Budaya Adat Tradisi yang digali di revitalisasi,di aktualisasi dengan target penetapan kinerja tahun 2019 sebesar 32,78 % realisasi 40,64 % melebihi dari target yang telah di tentukan capaian 123,98 % , dan dapat dikategorikan capaian kinerja ini **"sangat Baik**.







Kain Lipat 44 kabupaten Lingga

Persentase Nilai Budaya Adat Tradisi yang digali direvitalisasi di aktualisasi pada tahun 2019 mencapai 40,64 % dan telah mencapai target yang telah ditetapkan, pada tahun 2018 indikator ini mencapai 19,98 % sudah ada peningkatan di tahun sebelumnya sebesar 49,16 %. Pada tahun 2019 Dinas kebudayaan mengusulkan Karya Budaya sebanyak 34 karya budaya tetapi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Jakarta sebanyak 16 (enam belas) karya budaya yaitu Tradisi

Basuh Lantai, Tujuh Likur dan Pintu Gerbang Lingga, Berkhatam Al-Qur'an Lingga, Sunat Mudim, Bersih Tembuni Lingga, Bela Kampong, Kue Mueh Pengantin Lingga, Kepurun Lingga, Tudung Saji Pandan Lingga, Permainan Ambong Gile, Gasing Lingga, Permainan Tangkap Ayam, Tam-Tam Buku Lingga, Layang-Layang Lingga, Kain Lipat 44, Tuturan Asal Mula Nama Kampung Nerekeh, faktor penghambat pada indikator ini vaitu kurang nya respon Kabupaten/kota dalam penginyentarisasian dan pengusulan karya bUdaya tak benda, Keberhasilan Indikator ini didukung oleh kegiatan Pencatatan Karya Budaya Kepulauan Riau dan Pengusulan Karya Budaya Kepulauan Riau menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia, Kajian bedah Gurindam XII,Pelatihan Tudung Manto, Pelatihan gazal Tk. SMA , pelatihan pembuatan tanjak kegiatan ini bertujuan untuk menggali kembali karya budaya yang sudah di tetapkan oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan RI Jakarta dan memperkenalkan kembali kepada masyarakat khusus nya generasi muda tentang karya budaya yang dimiliki oleh kepulauan Riau sehingga untuk indikator Persentase Nilai Budaya Adat Tradisi yang digali direvitalisasi diaktualisasi pada tahun 2019 terealisasi sebanyak 19 (Sembilan belas) karya budaya yang di gali direvitalisasi dan diaktualisasi.

Adapun Persentase Nilai Budaya Adat Tradisi yang di gali direvitalisasi diaktualisasi pada setiap Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Persentase Nilai Budaya, Adat Tradisi yang digali, Direvitalisasi, Diaktualisasi se
Provinsi Kepri

No		Zepri yg sudah Zepri yg sudah		Ket	
	tercatat di Kemendikbud	karya Budaya menjadi WBTB	Budaya menjadi WBTB	Karya Budaya Menjadi WBTB	
1	92	24	19	43	Tahun 2019 diusulkan 34 karya budaya, yang dapat ditetapkan 16 karya budaya, dikarenakan Kurangnya kajian dan video ini, kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini pelatihan tudung manto,kajian bedah gurindam XII, pelatihan pembuatan tanjak,pelatihan atnjak Tk.SMA
	Total	24	19	43	

Sumber data Bidang Sejarah dan Tradisi

Kendala Yang dihadapi

- Kurangnya deskripsi yang jelas dari karya budaya itu sendiri
- Kurang dokumentasi foto yang standard an jelas dari karya budaya tersebut karena tidak adanya pengetahuan,sosialisasi,bimtek tentang standar foto yang jelas untuk fotografi dokumentasi sebuah karya budaya sehingga foto yang ada terkadang hanya foto standar dari pelaku budaya atau personal yang kebetulan mendokumentasikan.
- Kurang nya dokumentasi video yang ada sehingga mencoba mencari koleksi video yang direkam personal yang disebarkan di Youtobe,karena tidak adanya pengetahuan,sosialisasi,bintek tentang standar video yang jelas untuk dokumentasi video sebuah karya budaya sehingga video itu hanya bersifat standar saja

- Kurang karya ilmiah dan kajian pendukung tentang karya budaya tersebut membuat karya budaya tersebut hanya sebagi pencatatan sebagai karya budaya tidak bisa dilanjutkan untuk pengusulan penetapan warisan budaya tak benda Indonesia
- Kurang nya maestro atau tokoh setempat yang berkompeten dikarenakan maestro tersebut tidak begitu Fokus dalam pewarisan dan pembinaan sebuah karya budaya

Solusi

- Perlu nya dilakukan Updating pemetaan dan pendataan yang terarah dengan koordinasi pemerintah setempat dan UPT Kemendikbud dalam hal ini BPNB Tanjungpinang untuk melakukan kerjasama kegiatan tersebut
- Perlunya dilakukan bimtek untuk pembuatan film/video documenter standar yang jelas tentang karya budaya sehingga maksud dan tujuan yang dibutuhkan dalam dokumentasi tersebut terpenuhi.
- Perlu nya kerjasama yang intens dengan UPT Kemendikbud Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Tanjungpinang yang meliputi wilayah kerja provinsi kepulauan riau dan kalangan akademisi yang ada di provinsi kepulauan riau

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

N	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Output	Keterkaita	an output
o			(Perubahan)	Rp	kegiatan	terhadap	
			Rp.			pencapaian sasaran	
						Menunja	Kurang
						ng	menunj
						Pencapai	ang
						an	pencapa
							ian

1	Program	Gita Bahana	58.998.000	58.334.400	Jumlah		✓
	Pengemba	Nusantara			Peserta		
2	ngan Nilai	Seri Pengenalan	250.000.000	235.658.000	Jumlah	✓	
	Budaya	Budaya			peserta		
3		Bedah	225.000.000	178.840.200	Jumlah	✓	
		Gurindam Dua			Karya		
		Belas			Budaya		
					yang		
					ditetapka		
					n		
4		Pelatihan	165.000.000	146.649.400	Jumlah	✓	
		Teknik			peserta		
		Pembuatan			yang ikut		
		Tudong Manto					
5		Pencatatan dan	296.017.016	293.889.416	Jumlah	✓	
		Pengusulan			wbtb		
		Karya Budaya			yang		
		Tak Benda			ditetapka		
		Provinsi			n		
		Kepulauan Riau					
		Menjadi WBTB					
		Indonesia					
6		Pengembangan	235.380.339	218.472.200	Jumlah	✓	
		Data dan			buku		
		Dokumentasi			yang		
		Kebudayaan			dihasilkan		
7		Perekaman dan	235.000.000	234.414.752	Jumah	✓	
		Digitalisasi			peserta		
		Kebudayaan					
8		Penyusunan	200.000.000	108.069.906	Jumlah	✓	

	Sistem			buku		
	Informasi Data					
	Base			yang dihasilkan		
				ulliaslikali		
	Kebudayaan	200 000 000	204 425 700	2 11		
9	Pemantauan	300.000.000	291.125.700	Jumlah	✓	
	dan Evaluasi			data		
	Nilai					
	Kebudayaan					
10	Penulisan	179.000.000	176.593.750	Jumlah		✓
	Sejarah di Kepri			kajian		
11	Pelatihan	240.000.000	181.513.635	Jumlah	✓	
	Pembuatan			peserta		
	Tanjak					
12	Pelatihan Musik	150.000.000	149.183.000	Jumlah	✓	
	Gazal tk.SMA			peserta		
15	Pelatihan Adat	200.000.000	199.628.000	Jumlah	✓	
	Istiadat			peserta		
	Perkawinan					
	Melayu					
16	Percepatan	200.000.000	198.024.058	Jumlah	✓	
	Pulau			kajian		
	Penyengat					
	Menjadi					
	Warisan Budaya					
	Dunia					
17	Festival	220.000.000	218.792.000	Jumlah	✓	
	Permainan			permaina		
	Rakyat Melayu			n rakyat		
	Kepulauan Riau			yang di		
	Repaiddan Nad			pertandin		
				pertantan		

				gkan	
18	Penulisan dan	200.000.000	195.533.288		✓
	Pencetakan				
	Buku Khasanah				
	Manuskrip				
	Melayu				
	Kepulauan Riau				
	Abad 19				
20	Pembuatan	208.796.980	208.796.980		√
	Areal Parkir				
	Kendaraan				
	Bermotor				
	Kantor Dinas				
	Kebudayaan				
	Provinsi				
	Kepulauan Riau				
21	Pengadaan	200.000.000	199.837.500		√
	buku Pantun				
	Remaja				

c. Persentase Warisan budaya Tangible yang Lestari

Warisan budaya Tangible yang lestari adalah warisan budaya kebendaan yang sudah dilestarikan berupa cagar budaya yang sudah dilindungi atau dalam kondisi baik.

Warisan budaya Tangible yang lestari merupakan perbandingan dari jumlah cagar yang sudah dilindungi atau cagar budaya dalam kondisi baik/terawat dengan jumlah situs cagar budaya di 7 kabupaten/Kota

Evaluasi terhadap Warisan Budaya Tangible yang lestari Tahun 2019 dapat digambarkan jumlah kawasan, situs cagar budaya dalam kondisi baik yakni 60 situs

cagar budaya dibagi dengan jumlah situs cagar budaya yang ada di kabupaten/kota 286 dengan persentase 20.98 %

Hasil evaluasi Warisan budaya Tangible yang Lestari dengan target sebesar 20,98% dapat tercapai hanya sebesar 22,03 % sehingga capaian kinerja nya sebesar 105 % atau masih dapat dikategorikan kinerja "sangat baik".

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Warisan Tangible yang Lestari dari Tahun 2018-2019 :

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Warisan Tangible yang Lestari

N	ludiketer Vinerie	Realisasi	Realisasi	
N	o Indikator Kinerja	2018	2019	
1	Persentase Warisan Tangible yang Lestari	19,33	22,03	

Sumber data : Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman

dari tabel 3.8 menunjukkan adanya peningkatan disetiap tahunnya, pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya capaian indikator persentase warisan budaya tangible yang lestari pada tahun 2019 mencapai 22,03 % bila dibandingkan pencapaian Tahun 2018 yang hanya mencapai 19,33 % maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 telah terjadi kenaikan sebesar 87,74 % cagar budaya yang sudah lestari, ini dikarenakan sebaran cagar budaya bergerak/tidak bergerak di 7 (tujuh) kabupaten/Kota sudah bisa dijangkau dengan sarana transportasi darat atau air sehingga memudahkan tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan penanganan cagar budaya bergerak/tidak bergerak.



Sebelum dilakukan pelestarian cagar budaya Prasasti pasir panjang kabupaten karimun



Sesudah dilakukan pelestarian cagar budaya Prasasti pasir panjang kabupaten karimun

Prasasti ini secara administrasi berada di Desa Meral, Kecamatan Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Prasasti Pasir Panjang berada di areal lokasi pertambangan PT. Karimun Granite. PT. Karimun Granite sejak tahun 1971 telah mulai melakukan penambangan di bukit-bukit granit yang memiliki kualitas batu granit yang konon paling berkualitas di Asia1. Prasasti Pasir Panjang merupakan peninggalan bersejarah tentang penganut agama Buddha di Kepualau Riau. Prasasti ini dipahatkan pada dinding bukit batu granit dengan ukuran media yang ditulis berukuran batu 93 cm x 137 cm.Prasasti ini menggunakan huruf Pre-Nagari2 dan berbahasa Sansekrta. Prasasti berjumlah tiga (3) baris dengan ukuran masing-masing tulisan, baris ke-1 140 cm x 37 cm, baris ke-2 145 cm x 36 cm, dan baris ke-3 160 cm x 37 cm. Prasasti ini telah diberi cungkup pada tahun1993/1994 yang berukuran 208 cm x 267 cm. Tulisan terkesan kasar dan goresan tidak terlalu dalam dengan tebal tulisan 0-1 cm . pada gambar diatas pada tahun 2019 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan berupa Pemeliharaan lingkungan Cagar Budaya PRASASTI PASIR PANJANG Kabupaten Karimun, adapun realisasi yang dicapai sebesar 22,03 %, Prasasti ini merupakan cagar budaya bertuliskan huruf pre-nagari berbahasa sansakerta diperkirakan keberadaannya pada abad IX – XII Masehi dan merupakan tempat pemujaan agama budha dan menjadi destinasi wisata religi penganut agama budha dari etnis tionghoa singapura dan malaysia serta etnis india, pekerjaan yang sudah dilakukan berupa pembersihan lokasi prasasti, pembongkaran cungkup lama, pemasangan batu kali penahan tanah, galian pondasi dan pemasangan cungkup baru,

pemasangan pagar BRC, pemasangan paving block dan pembuatan taman berupa penanaman rumput gajah mini dan bunga kemuning serta pembuatan Plank Nama situsbata kanstin, pengecoran jalan setapak, pemasangan terakota, pembuatan gazebo 4 (empat) unit di sudut, dan penebangan pohon 4 (empat) batang. Di kota batam dilakukan pelestarian cagar budaya di makam zuriat Nong isa (kampong Tua nongsa), Komplek Makam Temenggung Abdul Jamal (bulang lintang), Rumah Limas Potong (kampung Tua Batu besar) .Sebaran cagar budaya di 7 (tujuh) kabupaten/Kota memiliki nilai penting bagi sejarah karena berkait erat peninggalan kerajaan Riau lingga johor pahang dan pemerintah kolonial, mempunyai potensi untuk diteliti untuk menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan tertentu seperti arkeologi dll, berperan penting dalam proses pendidikan bagi masyarakat seperti melalui pendidikan sejarah yang menginspirasi masyarakat dan cagar budaya terkait dengan aktivitas keagamaan dan/atau religi serta berhubungan dengan aspek etnik, estetik, publik, dan politis. Faktor pendorong percepatan tercapainya indikator ini adalah sudah tersedianya regulasi dan penetapan prosedur, sehingga memudahkan Tim Pelaksana Kegiatan bergerak untuk melakukan perlindungan terhadap cagar budaya bergerak/tidak bergerak sesuai dengan Pasal 95 ayat 1 UU nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya yang selanjutnya dipertegas dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2015 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menyatakan bahwa ruang lingkup pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dalam perda ini meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di darat dan di air.



Grafik Realisasi Capaian Kinerja

Grafik ini menggambarkan pada tahun 2018 realisasi sebesar 19,93 % cagar budaya dalam kondisi baik. Pada tahun 2019 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 20,98 % cagar budaya dalam kondisi baik realisasi capaian sebesar 22,03 % sampai dengan tahun 2019 sebesar 105,00 % dapat dikategorikan capaian kinerja "sangat baik"

Adapun Persentase Warisan Tangible yang Lestari pada setiap Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Persentase Warisan Tangible yang lestari se-Provinsi Kepri

		Tahu	n 2018	Tahun	2019
No	Kab/ Kota	Warisan Tangible dalam kondisi baik	Warisan tangible di 7 kab/kota	Warisan Tangible dalam kondisi baik	Warisan tangible di 7 kab/kota
1	Tanjungpinang	2	65	4	65
2	Bintan	-	45	-	45
3	Batam	-	20	3	20
4	Karimun	2	18	3	18
5	Lingga	53	106	53	106

6	Natuna	-	13	-	13
7	Anambas	-	19	-	19
Total		57	286	63	286

* Kendala yang dihadapi

- 1. Penetapan status cagar budaya di Provinsi Kepulauan Riau terkendala karena dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota hanya Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan yang sudah membentuk Tim ahli cagar budaya (TACB) mengacu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, adapun Tim ahli cagar budaya (TACB) berfungsi melakukan kajian dan merekomendasikan benda/bangunan/struktur/situs/kawasan yang diduga sebagai cagar budaya untuk ditetapkan sebagai benda/bangunan/struktur/situs/kawasan cagar budaya oleh Kepala Daerah.
- 2. Anggaran pelestarian cagar budaya di APBD Provinsi Kepri dan APBD Kabupaten/Kota sangat minim karena OPD kabupaten/kota yang menyatukan bidang pariwisata dan kebudayaan dalam satu organisasi kedinasan lebih memprioritaskan anggaran dibidang pariwisata karena bisa menarik destinasi wisata dibandingkan dengan bidang kebudayaan yang dianggap menghabiskan anggaran tanpa menyumbang PAD daerah secara langsung padahal cagar budaya merupakan warisan budaya bangsa yang harus dilestarikan keberadaannya.
- 3. Sebaran cagar budaya di Provinsi kepulauan riau yang ada di darat ratusan jumlahlahnya dan berpotensi sudah mengalami kerusakan dan pelapukan sehingga tidak sebanding dengan anggaran APBD Provinsi Kepri hanya mengalokasikan pemeliharaan/pemugaran 2 (dua) cagar budaya setiap tahunnya
- 4. Masih adanya oknum masyarakat yang berdomisili di lingkungan cagar budaya yang mengganggu pelestarian cagar budaya yang sedang dilakukan
- Tingkat keterawatan lingkungan Cagar Budaya PRASASTI PASIR PANJANG Kabupaten Karimun sangat rendah dan hampir tidak tersentuh tindakan pemeliharaan oleh Dinas yang membidangi kebudayaan di Kabupaten karimun

- dan PT. Karimun granite yang merupakan pemegang kuasa areal penambangan granit yang menjadi titik keberadaan lokasi prasasti pasir panjang.
- 6. Anggaran pelestarian cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kepri berupa pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya yang secara otonom berada di wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota sangat minim dan belum menjadi skala prioritas dibandingan porsi anggaran di bidang pariwisata

❖ Solusi

- 1. Mendorong Pemerintah kabupaten/kota segera membentuk tim ahli cagar budaya karena merupakan faktor penentu penetapan status hukum keberadaan cagar budaya yang ada di kabupaten/kota
- 2. Perlu adanya sosialisasi pelestarian cagar budaya di kabupaten/kota dalam rangka memberikan pengatahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat arti pentingnya keberadaan cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa.
- 3. Perlunya dukungan anggaran pelestarian cagar budaya yang lebih besar di APBD Provinsi Kepulauan Riau mengingat semakin banyaknya sebaran bangunan/struktur/situs cagar budaya di Provinsi Kepri yang mengalami kerusakan dan pelapukan sehingga mengancam keberadaan warisan budaya bangsa berupa cagar budaya.
- 4. Diharapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun dapat menganggarkan dana APBD untuk melakukan pengembangan lebih lanjut Prasasti pasir panjang pasca pemeliharaan prasasti pasir panjang yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri tahun anggaran 2019 mengingat prasasti pasir panjang sudah menjadi destinasi wisata religius oleh penganut agama budha dari mancanegara
- 5. Diharapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun dapat melibatkan PT.Karimun Granite untuk mengalokasikan dana CSR perusahaan dalam rangka pengembangan prasasti pasir panjang berskala lebih luas mengingat keterbatasan alokasi dana APBD Pemerintah Kabupaten karimun di bidang kebudayaan.

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

N	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Output	Keterkaita	n output
o			(Perubahan	Rp	kegiatan	terhadap	
)			pencap	oaian
			Rp.			sasaran	
						Menunja	Kurang
						ng	menun
						Pencapai	jang
						an	pencap
							aian
1	Program	Pelestarian	257.380.339	222.874.252	Jumlah	✓	
	Pengelolaa	cagar budaya			CB yang		
	n				lestari		
2	Kekayaan	Pengadaan	200.000.000	199.837.500	Jumlah		✓
	Budaya	Pakaian Adat			pakaian		
		Melayu			adat		
		Kepulauan Riau					
3	Program	Penyelamatan	70.000.000	59.537.000	Jumlah	✓	
	Pengelolaa	Benda-Benda			benda		
	n	Bersejarah			yang		
	Kekayaan				diselamat		
	Budaya				kan		
4		Pembuatan	40.000.000	39.047.000	Jumlah	✓	
		Buku Katalog			buku		
		Koleksi Galeri			yang		
		Museum dinas			dihasilkan		
		Kebudayaan					
5		Pembuatan rak	80.000.000	72.724.810	Paket	✓	
		koleksi					

	galeri/tata					
	pamer museum					
	dinas					
	kebudayaan					
6	Pengembangan	250.000.000	84.321.443	Aplikasi		✓
	Sistem					
	Informasi					
	Teknologi dan					
	Informasi					
	Publikasi					
	Kebudayaan					
7	Diklat ASN	120.000.000	97.641.057	Jumlah	✓	
	Bidang Cagar			ASN yang		
	Budaya dan Permuseuman			mengikuti		

d. Persentase Organisasi Budaya yang berkategori maju

Organisasi adalah Perkataan organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organon yang berarti alat, bagian, anggotam atau bagian badan. Sedangkan kata "organisasi" itu mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dalam mana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien.

Beberapa ahli mendefenisikan, "Organisasi adalah pola keadaan di mana sejumlah orang banyak, sangat banyak mempunyai teman berhubungan langsung dengan semua yang lain, dan menangani tugas-tugas yang kompleks, menghubungkan mereka sendiri satu sama lain dengan sadar, penentuan dan

pencapaian yang sistematis dari tujuan-tujuan yang saling disetujui" (John m. Pfifner dan Frank P. Sherwood 2003, hasibuan 2003:11).

Mengenai dasar hukum untuk mendirikan suatu perkumpulan atau perhimpunan, dapat dibagi menjadi dua dan memiki perbedaan dasar pengaturan yang berbeda, yaitu:

- a) Perkumpulan biasa (tidak berbadan hukum) yang merupakan organisasi massa dan tidak berbadan hukum, tunduk pada UU No.
 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ("UU Ormas").
 Perkumpulan ini pendiriannya cukup dengan akta notaris saja, dan kemudian didaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri.
- b) Perkumpulan yang berbadan hukum, perkumpulan seperti ini didirikan dengan akta notaris, dan kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Pengertian Budaya adalah Budaya berasal dari kata buddayah (bahasa Sanskerta) yang artinya budi (hati nurani) dan akal (intelegensi). Suatu bangsa dikatakan berbudaya tinggi dapat dilihat dari tingginya budi dan akal para warganya, dalam bentuk keanekaragaman hasil budayanya (keindahan seni tari, seni patung, seni bangunan, serta kemajuan ilmu dan teknologinya). Budaya merupakan konsep penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk waktu yang lama.

Mengenai penjabaran dari Indikator Organisasi Budaya di Kepulauan Riau, Dinas Kebudayan Provinsi Kepulauan Riau memproritaskan keberadaan Paguyuban, Komunitas Adat, Lembaga Adat, Lembaga Kepercayaan, dan Komunitas Tradisi. Pemajuan organisasi budaya yang akan diproritaskan untuk dilakukan pembinaan menurut Undang-Undang No 5 tentang Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017, dijelaskan :

- Paguyuban kedaerahan adalah perkumpulan yang anggota-anggotanya berasal dari satu daerah yang sama. Atau dapat juga berdasarkan pada kesamaan etnis.
- 2. Komunitas Adat adalah kesatuan sosial yang memiliki kesadaran wilayah sebagai daerah teritorial dan identitias sosial dalam berinteraksi

- berdasarkan nilai, norma, aturan adat baik tertulis dan/atau tidak tertulis.
- Lembaga Adat adalah organisasi sosial yang dinyatakan dengan adanya perangkat adat, aturan adat, pendukung masyarakat adat, dan mempunyai kesatuan wilayah adat.
- 4. Lembaga Kepercayaan adalah organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berhimpun dan bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai visi dan misinya.
- 5. Komunitas Tradisi adalah wadah berhimpunnya masyarakat dengan berbagai latar belakang yang spesifik dalam rangka melestarikan tradisi yang hampir punah.

Organisasi budaya yang berkategori maju adalah Organisasi Budaya yang secara spesifik memiliki kemampuan dalam memajukan nilai-nilai seni dan budaya Tradisional (di Provinsi Kepulauan Riau) dan dirasakan benar manfaatnya bagi masyarakat, berkategori maju mengembangkan mengakar kepada kebutuhan anggota khususnya, bahkan untuk masyarakat di sekelilingnya.

Persentase Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju merupakan perbandingan realisasi jumlah organisasi budaya yang berkembang dibagi organisasi yang ada di 7 Kabupaten/Kota dikali 100 %

Hasil evaluasi Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju dengan target sebesar 43,48% dapat tercapai sebesar 94,20 % sehingga capaian kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 216,66 % atau dalam kategori kinerja " sangat baik "

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju dari Tahun 2018-2019 :

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju

		<u> </u>	•	•
	No	Indikator Kinaria	Realisasi	Realisasi
		Indikator Kinerja	2018	2019
	1	Persentase Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju	37,68	94,20

Sumber data : Bidang Kesenian



Dilihat dari tabel 3.10 menunjukan Pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya Capaian Indikator Keempat yaitu Persentase Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju yang pada Tahun 2019 dengan target 43,48 % realisasi sebesar 94,20 %,capaian kinerja nya

melebihi dari target yang teah ditentukan yaitu sebesar 216,66 %, dibanding dengan realisasi pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 76,93 % Keberhasilan dari Indikator ini didukung sudah tersedianya regulasi dan dukungan kegiatan yang berorientasi terhadap pembinaan pengembangan sanggar yang maju dan memberikan prestasi yang maju baik di Regional dan Kesenian Nasional. Sehingga memudahkan Bidana untuk melakukan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan sesuai tupoksi kegiatan Bidang Kesenian di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2019 ini sebanyak 39 organisasi yang sudah di kategorikan maju,dapat di kategorikan maju karena organisasi ini selalu berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau dan memberikan karya budaya yang dapat di nikmati oleh masyarakat.



Grafik Realisasi Capaian Kinerja

Grafik ini menggambarkan pada tahun 2018 realisasi sebesar 37,68 % Organisasi yang berkategori maju. Pada tahun 2019 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 43,48 % atau 30 organisasi yang berkategori maju, realisasi dari indikator ini sebesar 79,71 % sehingga realisasi capaian sampai dengan tahun 2019 sebesar 183,33 % dapat dikategorikan capaian kinerja "sangat baik" ini adalah akumulasi dari tahun sebelumnya tetapi jika di hitung pertahun nya realisasi capaian indikator ini sebesar 56,52 % atau 39 organisasi budaya yang berkategori maju

Adapun Persentase Organisasi Budaya Yang berkategori Maju se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Persentase Organisasi Budaya Yang berkategori Maju
Se- Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

		TAH	UN 2018	TAHU	N 2019	
No	Kabupaten Kota	Jumlah Organisasi Budaya	Realisasi Organisasi Budaya yang berkategori Maju	Jumlah Organisasi Budaya	Organisasi Budaya yang berkategori Maju	Ket
1.	Tanjungpinang	11	2	11	10	

2.	Batam	20	0	20	9	
3.	Bintan	10	14	10	1	
4.	Karimun	18	0	18	11	
5.	Lingga	8	0	8	8	
6.	Natuna	1	0	1	0	
7.	Anambas	1	0	1	0	
	Total	69	16	69	39	

Sumber Data: Bidang Kesenian

Kendala Yang dihadapi

- Meskipun sasaran target sudah tercapai, masih belum sinerginya tanggungjawab teknis bidang Pendukung di tiap Bidang Dinas Kebudayaan tentang defenisi operasional Tupoksi Organisasi Budaya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.
- Organisasi Budaya masih bersifat umum, saat ini masih dikerjakan oleh Bidang Kesenian, perlunya dimasukkan Bidang Adat dan Tradisi menjadi Bidang Pendukung untuk pencapaian indikator proritas.
- Rekapitulasi organisasi budaya se Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2019 sudah baik, tetapi masih belum terdata secara akurat Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju di Kabupaten/Kota karena belum terbentuknya aplikasi secara terpadu di Dinas Kebudayaan.
- Sedikit kesulitan dalam koordinasi menyangkut data Organisasi Budaya, meskipun pada tahun 2019 sudah melakukan Forum Group Diskusi 7 Kabupaten Kota intern meninjaklanjuti indikator provinsi.

❖ Solusi

- Lebih meningkatkan kembali kerjasama dan dipandang perlu untuk melakukan rakor kebudayaan Se-Provinsi Kepulauan Riau; (a) Dapat mendukung evaluasi bidang kesenian di wilayah Kabupaten Kota.(b) Kerjasama dengan stakeholder bersama mensosialisasi indikator baru dinas kebudayaan sehingga kedepan memiliki sasran keseragaman indikator di 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau.
- Menghimbau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Se Provinsi Kepulauan

Riau untuk melaporkan kegiatan Semester yang menyangkut dengan organisasi Budaya di Daerah.

 Memproritaskan pagu kegiatan Bidang Kesenian yang berorientasi dengan peningkatan pencapaian indikator.

F. Persentase Sanggar Seni yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal

Salah satu pengertian 'Sanggar' di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat untuk kegiatan seni. Dengan kata lain, istilah sanggar juga dapat diartikan sebagai sebuah tempat untuk berkesenian, baik untuk seni lukis, seni tari, seni musik, maupun seni pertunjukkan. Di dalam sanggar individu-individu melakukan interaksi secara berkesinambungan mulai dari hanya sekadar berwacana, beradu argumen, sampai pada implementasi sintesis yang telah disepakati.

Sanggar adalah tempat / wadah dimana berkumpul atau bertemu untuk bertukar pikiran (pembahasan, pengolahan, dsb.) tentang suatu bidang ilmu atau bidang kegiatan tertentu. Sedangkan Sanggar Seni adalah tempat atau wadah dimana seniman-seniman mengolah seni guna suatu pertunjukan. Selain itu, di dalam sanggar ini pula ada kegiatan-kegiatan yang sangat penting, yaitu menggali, mengola dan membina seni bagi para seniman. Setiap sanggar seni ada organisasinya, yaitu mulai dari pimpinan hingga koordinator bidang pembinaan.(koordinator bidang tari, teather, vokal, musik, seni ukir, lukis dan lain-lainnya).

Seni adalah proses dan produk dari memilih medium, dan suatu set peraturan untuk penggunaan medium itu, dan suatu set nilai-nilai yang menentukan apa yang pantas dikirimkan dengan ekspresi lewat medium itu, untuk menyampaikan baik kepercayaan, gagasan, sensasi, atau perasaan dengan cara se-efektif mungkin untuk medium itu untuk mengungkap gagasan tertentu lewat simbolisme dan bentuk.

Sanggar Seni adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk berkegiatan seni seperti seni tari, seni lukis, seni kerajinan atau kriya, seni peran, dan sebagainya.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal adalah Sanggar Seni yang secara spesifik memiliki kemampuan dalam berkegiatan seni (Seperti seni tari, seni lukis, seni kerajinan atau kriya, seni peran dls), yang memajukan keragaman seni dan budaya Tradisional (di Provinsi Kepulauan Riau). Meliputi proses dari pembelajaran, penciptaan hingga produksi dan semua proses hampir sebagian besar dilakukan di dalam sanggar (tergantung ada tidaknya fasilitas dalam sanggar).

Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian Dan Tradisi Lokal merupakan perbandingan realisasi jumlah sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal dibagi jumlah sanggar seni Kabupaten/kota (206) dikali 100 ditambah realisasi tahun sebelumnya.

Hasil Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian Dan Tradisi Lokal dengan target sebesar 35,62 % dapat tercapai sebesar 66,02 % sehingga capaian kinerja hanya sebesar 185,35 % atau dalam kategori kinerja "sangat Baik".

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian Dan Tradisi Lokal dari Tahun 2018-2019 :

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian Dan Tradisi Lokal

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019
1	Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian Dan Tradisi Lokal	13,29	66,02

Sumber data : Bidang Kesenian



Tabel 3.12 menunjukan ada nya peningkatan untuk realisasi di setiap tahun nya Pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari Capaian Indikator kelima terlaksananya Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian Dan Tradisi Lokal yang pada Tahun 2019 target 35,62 % realisasi sebesar 66,02 %, dibandingkan pencapaian tahun 2018 yang hanya mencapai 13,29 % maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 telah terjadi kenaikan sebesar

20,68 % tetapi untuk capaian tahunan nya indikator ini capaian kinerja nya sebesar 185,35 % dapat dikategorikan capaian kinerja nya "sangat baik" capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan terjadi peningkatan yang signifikan ini dikarenakan adanya kegiatan pendukung tercapai indicator ini yaitu survey dan monitoring bidang kebudayaan dan rekon dari 7 kabupaten/kota. Sehingga dapat memudahkan dinas kebudayaan dalam mengumpulkan data dan melakukan pembinaan terhadap sanggar yang ada di kepulauan riau,pada tahun 2019 ini ada 105 sanggar yang sudah aktif mengajarkan kesenian dan tradisi local.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan capaian Indikator ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu Parade Tari dan Daerah Nusantara, Seleksi Festival kesenian, partisipasi event bidang kebudayaan,penyelenggaran event bagi penggiat seni , Keberadaan lingkungan seni sebagai upaya untuk melindungi, mengembangkan, dan pemanfaatan kesenian untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan sebagai penguat jati diri bangsa dalam prakteknya banyak menemui kendala seperti kurangnya pendanaan yang diberikan oleh pemerintah karena keterbatasan dana dari APBD. Meskipun begitu Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tetap berusaha memfasilitasi eksistensi berkesenian para pelaku seni khususnya seni tradisi yang bernaung pada Lingkungan seni yang memang telah terdaftar di Dinas Kebudayaan Provinsi kepulauan Riau, hingga bisa dikatakan Dinas Kebudayaan mengkriteriakan

lingkungan/sanggar seni yang disebut aktif adalah mereka yang secara kontinuitas menjalankan aktivitas keseniannya serta memperpanjang legalitas keberadaanny, Faktor penghambat pada indikator ini kurangnya upaya pembinaan dan pelatihan bagi para penggiat seni dalam rangka mengkaji, menciptakan dan mengembangkan karya-karya seni yang dihasilkan, belum optimalnya kerjasama kemitraan dengan insan penggiat /pelaku seni untuk mengatasi permasalahan tersebut strategi yang akan diambil guna mencapai indikator tahun 2019 adalah dinas kebudayan akan lebih banyak berkoordinasi dengan penggiat seni yang ada di di kepulauan riau dan melakukan kerjasama dengan cara pembinaan terhadap manajemen pengelolaan khususnya di organisasi dan sanggar seni daerah yang ada di kepulauan riau.



Grafik Capaian Kinerja

Grafik ini menggambarkan pada tahun 2018 realisasi sebesar 13,29 % sanggar yang aktif mengajarkan seni dan tradisi lokal. Pada tahun 2019 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 35,62 % realisasi s/d dengan tahun 2019 sebesar 66,02 % melebihi dari target yang telah ditetapkan ini di keranakan adanya komitmen yang kuat terhadap indicator ini sehingga capaian kinerja ini dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh dinas kebudayaan,jika tidak diakumulasi kan dari tahun sebelumnya realisasi ini tercapai sebesar 50,97 % atau 105 sanggar yang sudah mengajarkan kesenian dan tradisi local.

Adapun Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Persentase Sanggar Seni Yang Aktif
Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal
Se- Provinsi Kepulauan Riau

		T	'AHUN 201	.8	TAI	HUN 2019	
No	Kabupa	ten/kota	Jumlah sanggar yang ada	Realisasi Sanggar Seni Aktif	Jumlah Sanggar Seni Yang Ada	Realisasi Verifikasi Sanggar Seni Aktif	Ket
1	Tanjungpii	nang	27	5	27	12	
2	Batam		39	2	39	20	
3	Bintan		35	1	35	11	
4	Kabupaten karimun		29	2	29	20	
5	Kabupaten lingga		30	2	30	29	
6	Kabupaten	natuna	19	1	19	5	
7	Kabupaten	Anambas	31	1	31	8	
	TOT	ΓAL	206	14	206	105	

Sumber data bidang kesenian

Kendala Yang dihadapi

- Masih belum optimal nya pembinaan pada sanggar –sanggar yang ada di kepulauan riau.
- Belum Selarasnya Indikator Provinsi dengan Indikator Kabupaten Kota dikarenakan ditemui masih berbedanya nomenklatur OPD Provinsi dengan Kabupaten/Kota sehingga Provinsi sedikit kesulitan dalam koordinasi menyangkut data Sanggar Seni yang Aktif

♣ Solusi

- Perlu dilakukannya kerjasama dengan stakeholder bersama mensosialisasi indikator baru dinas kebudayaan sehingga ke depan memiliki sasaran keseragaman indikator di & 7 Kabupaten/Kota.
- Provinsi akan melakukannya pendataan yang lebih akurat dikarenakan SOTK
 Dinas Kebudayaan sudah ada Bidang Pendataan dan Dokumentasi.

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

N	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Output	Keterkaitan output	
0			(Perubahan	Rp	kegiatan	terhadap	
)			pencapaia	an sasaran
			Rp.			Menunja	Kurang
						ng	menunja
						Pencapa	ng
						ian	pencapai
							an
1	Program	Gebyar Budaya	500.000.000	498.807.665	Jumlah	√	
	Pengelolaa	Kepri di TMII			Peserta		
2	n	Parade tari	400.000.000	391.088.349	Jumlah	√	
	Keragama	daerah dan			Peserta		
	n Budaya	nusantara					
3		Workshop Tari	140.000.000	137.817.509	Jumlah	√	
		Tradisi			event		
					yang		
					diikuti		
4		Workshop	200.000.000	118.605.200	Jumlah		✓
		Teater			Peserta		
5		Pagelaran	450.000.000	400.455.050	Jumlah	√	

Tradisi Pesisir event yang diikuti Anugrah 100.000.000 99.394.109 Jumlah Peserta Kebudayaan Penyelenggara 330.000.000 328.272.500 Jumlah peserta Lembaga Penggiat Seni dan Budaya Seleksi Festival Kesenian Nasional Partisipasi Sundanga 330.000.000 302.768.547 Fevent Bidang
diikuti Anugrah 100.000.000 99.394.109 Jumlah Peserta Rebudayaan 7 Penyelenggara 330.000.000 328.272.500 Jumlah peserta Lembaga Penggiat Seni dan Budaya 8 Seleksi Festival Nasional Partisipasi 330.000.000 302.768.547 ✓
Bidang Kebudayaan Penyelenggara an Event Lembaga Penggiat Seni dan Budaya Seleksi Festival Nasional Peserta Peserta Peserta Peserta Aumlah peserta Peserta Aumlah peserta Penggiat Seni dan Budaya Seleksi Festival Partisipasi 330.000.000 328.272.500 Jumlah peserta V Pereta Peserta Peserta Peserta Aumlah peserta Pereta Peserta Peserta Aumlah Pereta Peserta Peserta
Bidang Kebudayaan Penyelenggara 330.000.000 328.272.500 Jumlah an Event Lembaga Penggiat Seni dan Budaya Seleksi Festival Kesenian Nasional Partisipasi 330.000.000 302.768.547
Kebudayaan Penyelenggara 330.000.000 328.272.500 Jumlah ✓ Jumlah ✓ peserta Lembaga Penggiat Seni dan Budaya Seleksi Festival 79.000.000 63.958.154 Jumlah ✓ Kesenian Nasional Partisipasi 330.000.000 302.768.547 ✓
Penyelenggara 330.000.000 328.272.500 Jumlah an Event Lembaga Penggiat Seni dan Budaya Seleksi Festival 79.000.000 63.958.154 Jumlah Kesenian Nasional Partisipasi 330.000.000 302.768.547 ✓
an Event Lembaga Penggiat Seni dan Budaya Seleksi Festival 79.000.000 63.958.154 Jumlah Kesenian Nasional Partisipasi 330.000.000 302.768.547 ✓
Lembaga Penggiat Seni dan Budaya Seleksi Festival 79.000.000 63.958.154 Jumlah Kesenian Nasional Partisipasi 330.000.000 302.768.547 ✓
Penggiat Seni dan Budaya Seleksi Festival 79.000.000 63.958.154 Jumlah veent Kesenian Nasional Partisipasi 330.000.000 302.768.547 ✓
8 Seleksi Festival 79.000.000 63.958.154 Jumlah Kesenian Nasional ✓ 9 Partisipasi 330.000.000 302.768.547 ✓
8 Seleksi Festival 79.000.000 63.958.154 Jumlah Kesenian event Nasional 9 Partisipasi 330.000.000 302.768.547 ✓
Kesenian event Nasional Partisipasi 330.000.000 302.768.547
Nasional Partisipasi 330.000.000 302.768.547 ✓
9 Partisipasi 330.000.000 302.768.547 ✓
Liverit bluarity
Kohudayaan
Kebudayaan Publikasi 200,000,000 199,576,059
Bidang
Kebudayaan
11 Pengadaan 100.000.000 96.545.808
Alat Musik
Tradisional
12 Pentas Seni 200.000.000 199.210.000
Pulau Benan
13 Festival Seni 200.000.000 199.509.000
Marawis

14	Survey	dan	300.000.000	290.681.800	✓	
	Monitoring]				
	Bidang					
	Kebudayaa	an				

5.4. Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2019 sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana yang tertuang dalam anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau, baik yang dialokasikan dalam anggaran kegiatan maupun rutinitas perkantoran sebagai penunjang.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Daerah beserta instruksi, petunjuk dan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan makna dan substansi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004.

Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan untuk Dinas Kebudayaan seluruhnya berjumlah Rp.19.975.745.887. Dana yang telah direalisasikan sebesar Rp.18.735.093.262,- (93,78 %), mencakup Belanja Pegawai dan 7 program dengan 49 kegiatan.

Tabel 3.14
Realisasi Penyerapan Dana Per 31 Desember 2019

	Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Penyera pan Anggara n (%)
1		lanja Tidak ngsung				
		a. Belanja Pegawai	7.388.293.013	7.055.620.736	332.627.277	95,49%
1	Belanja L Langsung :					
	a.	Belanja Pegawai	606.503.125	486.032.750	120.470.375	80,13%
	b.	Belanja Barang dan Jasa	11.451.489.749	10.675.228.166	776.261.583	93,22%
	c.	Belanja Modal Jumlah	529.460.000 12.587.452.874	518.211.610 11.679.472.526	11248.390 907.980.348	93,87% 92,78%

Realisasi penyerapan anggaran Dinas Kebudayaan pada tahun 2019 dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar Rp. 11.679.472.526 dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program /kegiatan utama sebesar 69,53 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 30,47%,

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran,pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk sasaran pembangunan tahun 2019 telah mencukupi.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019

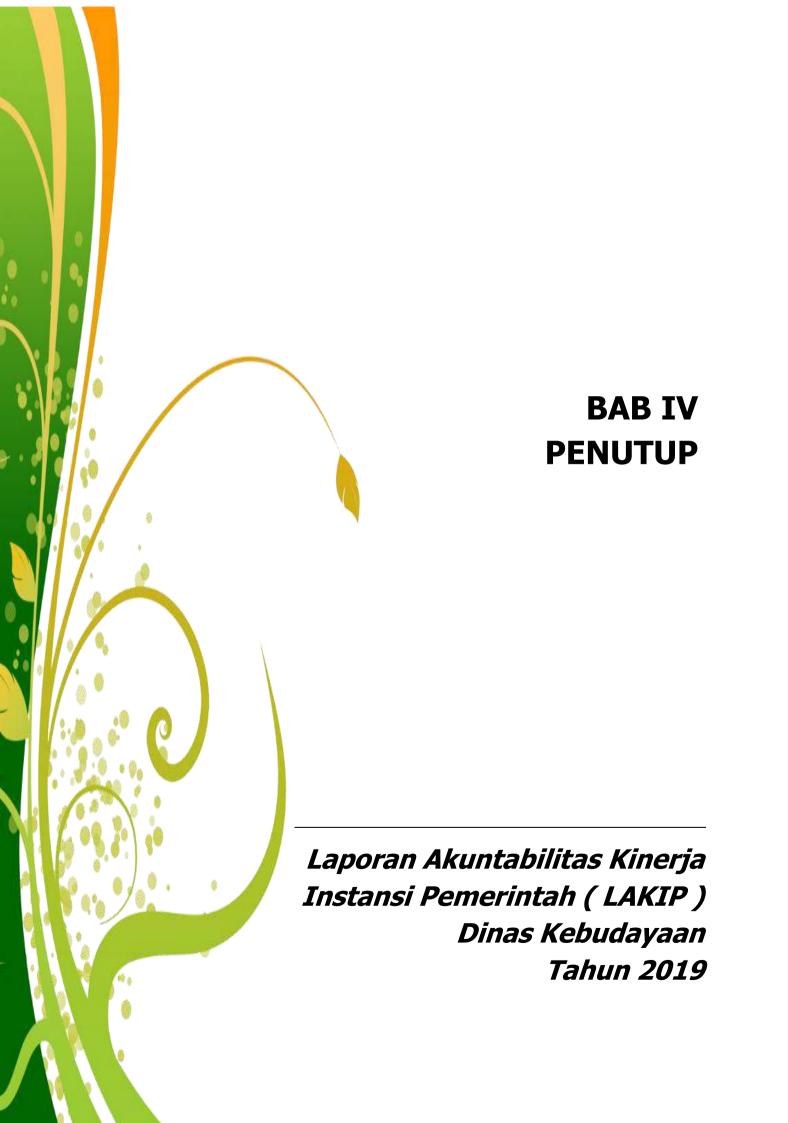
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai Program/Kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut

TABEL 3.15
Anggaran dan realisasi belanja langsung per Indikator Tahun 2019

N	Sasaran Indikator			Kinerja		Α	nggaran	l
0			Target	Realisa	%	Target	Realisa	%
				Sİ	Realisa si		Sİ	Realisa si
1	Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembang an,Pemanfaat an) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau	Persentase bangunan Yang berciri khas Melayu Persentase nilai budaya,adat tradisi yang digali,direvital isasi,diaktuali sasi	32,78	14,32 40,64	123,68	550.000 .000 3.763.1 92.335	533.78 1.149 3.492. 912.38 5	97,05
		Persentase warisan tangible yang lestari Persentase Organisasi Budaya Berkategori	20,98	94,20	216,65	200.000 .000 830.000 .000	193.39 3.700 745.78 1.309	99,70 89,85

maju						
Perse	ntase 35,67	2 66,02	185,35	2.699.0	2.580.	95,62
Sangg	ar seni			00.000	908.94	
yang	aktif				1	
meng	ajarkan					
kesen	an dan					
tradis	lokal					





Bab IV Berisi:

- 1. Kesimpulan
- 2. Saran
- 3. Penghargaan

BAB IV PENUTUP

Secara umum Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan 2017-2021. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang diinginkan.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau di tahun yang akan datang harus ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian terhadap indikator kinerja. Upaya strategis terhadap pemecahan masalah tersebut adalah :

- Meningkatkan kecermatan perencanaan diikuti dngan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Kebudayaan khususnya dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya.
- 2. Meningkatkan program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan serta ketepatan waktu dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah berlaku.
- 3. Pengumpulan data perlu ditingkatkan, sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabankan.
- 4. Mensinerjikan program kegiatan dengan Indikator kinerja utama yang telah ditetapkan setiap tahun nya oleh Dinas Kebudayaan sehingga akan lebih mudah dalam pencapaian indicator setiap tahunnya

Demikian pemaparan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan 2019, semoga dapat memberikan manfaat kepada berbagai

pihak dan berguna sebagai bahan evaluasi bagi aparatur di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

IV.I. Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh di Tahun 2019

Dinas kebudayaan telah melaksanakan beberapa program kegiatan yang mendukung terwujudnya capaian kinerja. Dari beberapa program yang telah dilaksanakan, Dinas Kebudayaan telah mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat nasional tahun 2019

- Kegiatan Parade Tari Daerah dan Nusantara pada tanggal 16 Agustus 2018 bertempat di Sasana Budoyo Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Penyelenggaraan Parade Tari Nusantara Tahun 2019 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta diikuti oleh 28 Provinsi Se–Indonesia. perolehan trofi dan kriteria pemenang angsana dance Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau sbb:
 - Penata Musik Unggulan Nasional
 - Penyaji Terbaik I3 Besar Kategori Nasional
 - Koreografer Terpilih 5 Terbaik Nasional
 - Penata Rias dan Busana Terpilih 5 Terbaik Nasional
 - Penyaji Kelompok Terpilih 5 Terbaik Nasional
 - Penetapan 16 WBTB Kepri Sebagai WBTB Indonesia
- Dinas Kebudayaan pada tahun 2019 memperoleh 16 (enam) sertifikat atas penetapan menjadi Warisan Budaya Tak benda Nasional oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan sbb :
 - Permainan Ambong Gile
 - Permainan Tangkap Ayam
 - Sunat Mudim
 - Tam-Tam Buku Lingga
 - Tradisi Basuh Lantai
 - Tudung Saji Pandan Lingga
 - 7 Likur dan Pintu Gerbang Lingga
 - Tuturan Asal Mula Nama kampung Nerekeh

- Bela Kampong
- Berkhatam Alqur'an Lingga
- Bersih Tembuni Lingga
- Gasing Lingga
- Kain Lipat 44
- Kepurun Lingga
- Kue Mueh Pengantin Lingga
- Layang-Layang Lingga

LAMPIRAN





LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019







































PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Ir. YERRI SUPARNA, MM

Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ISDIANTO, S.Sos. M.M.

Jabatan : Plt. Gubernur Kepulauan Riau

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawah kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang,

DBA F028175464

Oktober 2019

PIHAK KEDUA,

PIt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU WAKIL GUBERNUR, PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

H. ISDIANTO, S.Sos, M.M.

Ir. YERRI SUPARNA,MM Pembina Utama Madya

NIP. 19620418 199303 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019 DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Kinerja Dalam Pelestarian (Pelindungan,	Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu	32,33
	Pengembangan, Pemanfaatan) Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Nilai Budaya, Adat Tradisi yang di Gali, di Revitalisasi, di Aktualisasi	32,78
		Persentase Organisasi Budaya yang Berkategori Maju	43,48
		Persetanse Sanggar Seni yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal	35,62
		Persentase Warisan Budaya Tangible yang Lestari	20,98

Program		19	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Rp.	4.313,192,335	APBD-P
2.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp.	1.017.380.339	APBD-P
3.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp.	3.529,000,000	APBD-P

Tanjungpinang, Oktober 2019

PIHAK KEDUA,

PIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU WAKIL GUBERNUR,

DEAHF026175476

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PIHAK PERTAMA,

H. ISDIANTO, S.Sos. M.M.

Ir. YERRI SUPARNA, MM Pembina Utama Madya

NIP. 19620418 199303 1 005



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2019 DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1		Persetanse Bangunan yang berciri khas melayu	%	32,33
2		Persentase nilai budaya,adat tradisi yang digali,direvitalisasi,diaktualisasi	%	32,78
3	Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Perlindungan,Pengembangan, Pemanfaatan)kebudayaaan Provinsi Kepulauan Riau	Persentase organisasi budaya yang berkategori maju	%	43,48
4		Persetanse Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	%	36,62
5		Persentase Warisan tangible yang lestari	%	21,68

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ir. YERRI SUPARNA, MM Pembina Utama Madya NIP. 19620418 199303 1 005



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019 DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Persetanse Bangunan yang berciri khas melayu	%	32,33	14,32	44,29	Tidak tercapai
2	Peningkatan kinerja dalam Pelestarian	Persentase nilai budaya,adat tradisi yang digali,direvitalisasi,diaktualisasi	%	32,78	40,64	123,98	Tercapai
3	Peningkatan kinerja dalam Pelestahan (Perlindungan,Pengembangan, Pemanfaatan)kebudayaaan Provinsi Kepulauan Riau	Persentase organisasi budaya yang berkategori maju	%	43,48	94,20	216,65	tercapai
4		Persetanse Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	%	35,62	66,02	185,35	tercapai
5		Persentase Warisan budaya tangible yang lestari	%	20,98	22,03	105,00	tercapai

NO	PROGRAM UTAMA ANGGARAN		REALISASI	%
1	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	4.313.192.335	4.026.693.534	93,36
2	PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	1.017.380.339	775.983.062	76,27
3	PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	3.529.000.000	3.326.690.250	94,27

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ir. YERRI SUPARNA, MM Pembina Utama Madya NIP. 19620418 199303 1 005